KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : AKD Diminta Proporsional
Tanggal : Sabtu, 05 Oktober 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

AKD Diminta Proporsional

GALIH PRADIPTA/ANTARA



RAPAT PIMPINAN Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kanan) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), M Aziz Syamsuddin (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) bersiap memimpin rapat pimpinan fraksi-fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Rapat tersebut membahas pemanfaatan ruang kerja dan rumah dinas bagi anggota DPR periode 2019-2024.

● ARIF SATRIO NUGROHO

Pemilihan AKD diharapkan tercapai mufakat.

JAKARTA — DPR dijadwalkan mulai pembahasan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) pada pekan depan. Ketua DPR Puan Maharani menuturkan, pembentukan AKD di DPR tidak perlu menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, Puan mengaku harus bertemu terlebih dahulu dengan seluruh pimpinan fraksi untuk memulai pembahasan pembentukan AKD.

"Nanti prosesnya kita akan lakukan dulu di rapim Senin atau Selasa, untuk kemudian bertemu juga rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).

Pertemuan dengan fraksi dilakukan untuk menentukan pembentukan komisi. Setelah itu disepakati, DPR akan melakukan pembentukan AKD. Terkait lamanya pembentukan AKD, Puan belum dapat memastikan kapan akan selesai. Sebab, ia menilai dinamika di parlemen masih dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, ia menjanjikan proses pembentukan AKD nanti tetap mengedepankan musyawarah mufakat. *Hal itu dibutuhkan agar proses pemilihan AKD* tidak memakan waktu yang lama.

"Namun, untuk terlalu cepat tidak perlu juga, karena *kan* nanti pemerintahan periode selanjutnya juga akan baru dimulai 20 Oktober," ujarnya. Ia menambahkan, pembahasan AKD akan diawali dengan rapat pimpinan DPR pada Senin (7/10) atau Selasa (8/10) pekan depan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi.

Menurut dia, rapat konsultasi itu untuk menentukan pembentukan komisi-komisi dan setelah itu disepakati pembentukan AKD. Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, kalaupun nanti ada peleburan kementerian di Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, tidak menjadikan masalah dalam pembentukan AKD di DPR. Sebab, komisi di DPR tidak berubah sehingga tinggal bersinergi.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berharap, pembentukan AKD nanti juga akan menentukan jatah yang diperoleh tiap fraksi dalam tiap alat kelengkapan. Ia memastikan, dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi, akan ditentukan jumlah AKD dan fraksinya. Menurut Yandri, dari 16 alat kelengkapan di DPR akan terdiri dari 11 komisi dan lima AKD. Di mana nanti ada 16 ketua ditambah tiga wakilnya masing-masing.

Ia berharap, pembagian AKD disesuaikan dengan proporsi masing-masing fraksi di DPR. "Itu yang didistribusikan ke masing-masing. Namun, ya tadi, tentu yang banyak dapat banyak, yang sedang dapat sedang, yang sedikit dapat sedikit," ujar Yandri.

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengatakan, DPR sudah memiliki rumus sendiri menentukan jumlah yang akan didapatkan setiap partai. PAN siap mengikuti mekanisme yang ada dalam penentuan AKD ini. "Jadi, PAN itu kemungkinan dapat pimpinan ketua komisi paling satu, wakilnya antara tiga sampai empat. Namun, akan dibicarakan, yang pastinya di komisi berapa akan dimusyawarahkan," katanya.

Sementara, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya sebagai salah satu partai yang memiliki suara terbanyak di DPR tentu ingin berperan lebih besar dan nyata. Golkar yang memiliki banyak politisi muda berencana untuk mendudukkan para kader mudanya di posisi tersebut. Ia menilai itu sebagai bagian dari regenerasi dan penyegaran di tubuh Fraksi Partai Golkar.

"Fraksi Golkar akan memberi ruang kepada para kader muda dan kader terbaiknya di alat kelengkapan DPR," ujar Ace.

Fasilitas rumah

Sebanyak 575 anggota DPR akan mendapatkan jatah rumah dinas yang berlokasi di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. Pemberian jatah rumah itu telah diputuskan dalam rapat pimpinan fraksi pada Jumat (4/10). "Jadi, sudah diputuskan bahwa terkait dengan pembagian rumah jabatan, kita sudah menyepakati dengan semua fraksi yang ada di DPR 575 anggota DPR akan menempati rumah jabatan yang ada di Kalibata dan Ulujami," kata Puan Maharani.

Jatah rumah dinas itu diatur bersama dan disetujui oleh semua fraksi parpol. Seluruh fraksi parpol kemudian berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terkait penempatan anggota dewan yang mendapatkan jatah rumah dinas tersebut. Di samping rumah, semua anggota DPR 575 juga mendapatkan ruang kerja. Peletakan posisi ruang kerja tersebut, kata Puan, akan difinalisasi pada Senin, termasuk rapat AKD yang akan digelar pada Senin mendatang.

■ nawir arsyad akbar **ed:** agus raharjo